

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**KECAMATAN WONODADI
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segalanya atas segala rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap program kegiatan yang direncanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada pemrinthan Kecamatan Wonodadi.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Wonodadi lima tahunan sudah direncanakan melali Rentra Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat didasari bahwa laporan ni belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini. Saran dan pendapat serta kritik yang bersifat membangun sari pengguna LKjIP ini untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan tahun berikutnya akan kami terima dengan senang hati.

Akhirnya apa yang dapat tersaji ini mudah – udahan ada
guna dan manfaatnya



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pencapaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan penilaian kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, yang merupakan pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Wonodadi Kabupten Blitar selama tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar adalah visi Pemerintah Kabupaten Blitar periode 2021-2026 sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)”**.

Dalam hal ini Kecamatan Wonodadi melaksanakan amanat Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya . Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi sosial diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya dan Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas”. Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi

tercapainya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah terciptanya Reformasi Birokrasi yang berkualitas. Reformasi Birokrasi yang berkualitas adalah melalui peningkatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan:

1. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas
2. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan Publik Hingga ke Desa
3. Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan yang dijabarkan pada 4 (sasaran) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 5 (lima) indikator kinerja dengan didukung 6 (enam) program dalam mendukung pencapaian sasaran.

Sasaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah dengan indikator predikat sakin

Sasaran II : Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa dengan indicator Persentase keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang ditindak lanjuti

Sasaran III : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan desa dengan indicator Persentase desa yang memiliki administrasi baik dan Jumlah Bumdes yang ada di Kecamatan

Sasaran IV : Menurunnya jumlah pelanggaran di Kecamatan indikator Persentase penurunan pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan

Secara umum Kecamatan Wonodadi Tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2,343,600,009.00 yang telah direalisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.216.274.171,00 dan capaiannya sebesar 94,57%. Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dan perlu menjadi perhatian Kecamatan Wonodadi antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan Kecamatan Wonodadi
2. Belum optimalnya kualitas pembangunan wilayah

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan;
2. Mengoptimalkan sistem pelayanan digital
3. Mengoptimalkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	11
PENDAHULUAN.....	11
A. Penjelasan Umum Organisasi.....	11
B. Aspek Strategis Organisasi.....	14
C. Dasar Hukum.....	16
D. Sistematika Dokumen.....	17
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Visi dan Misi.....	9
B. Tujuan dan Sasaran.....	11
C. Indikator Kinerja Utama.....	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024.....	17
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Pengukuran Kinerja.....	26
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
1. Definisi Operasional dari Setiap Indikator Kinerja.....	28
2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	30
3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu.....	34
4. Perbandingan Antara Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	36
5. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional.....	37
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	38
7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	55
C. Realisasi Anggaran.....	56
BAB IV.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Pemecahan Masalah.....	60
C. Tindak Lanjut.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ASN Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar	14
Tabel 1. 2 Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar masalah	14
Tabel 1. 3 Isu-isu Strategis Kecamatan Wonodadi	16
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
Tabel 2. 3 Rincian Anggaran Pada Tahun 2024	18
Tabel 3. 1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja.....	27
Tabel 3. 2 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja.....	27
Tabel 3. 3 Hasil Evaluasi SAKIP 2024	29
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja	31
Tabel 3. 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	34
Tabel 3. 6 Pencapaian Kinerja Antara Realisasi dan Target Jangka Menengah Renstra.....	36
Tabel 3. 7 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.....	37
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai ke Desa.....	41
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Desa	43
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	49

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban.....	53
Tabel 3. 12 Realisasi kinerja dan keuangan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Wonodadi... 13

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pelayanan publik terhadap wilayah Kecamatan Wonodadi.

Melalui Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh

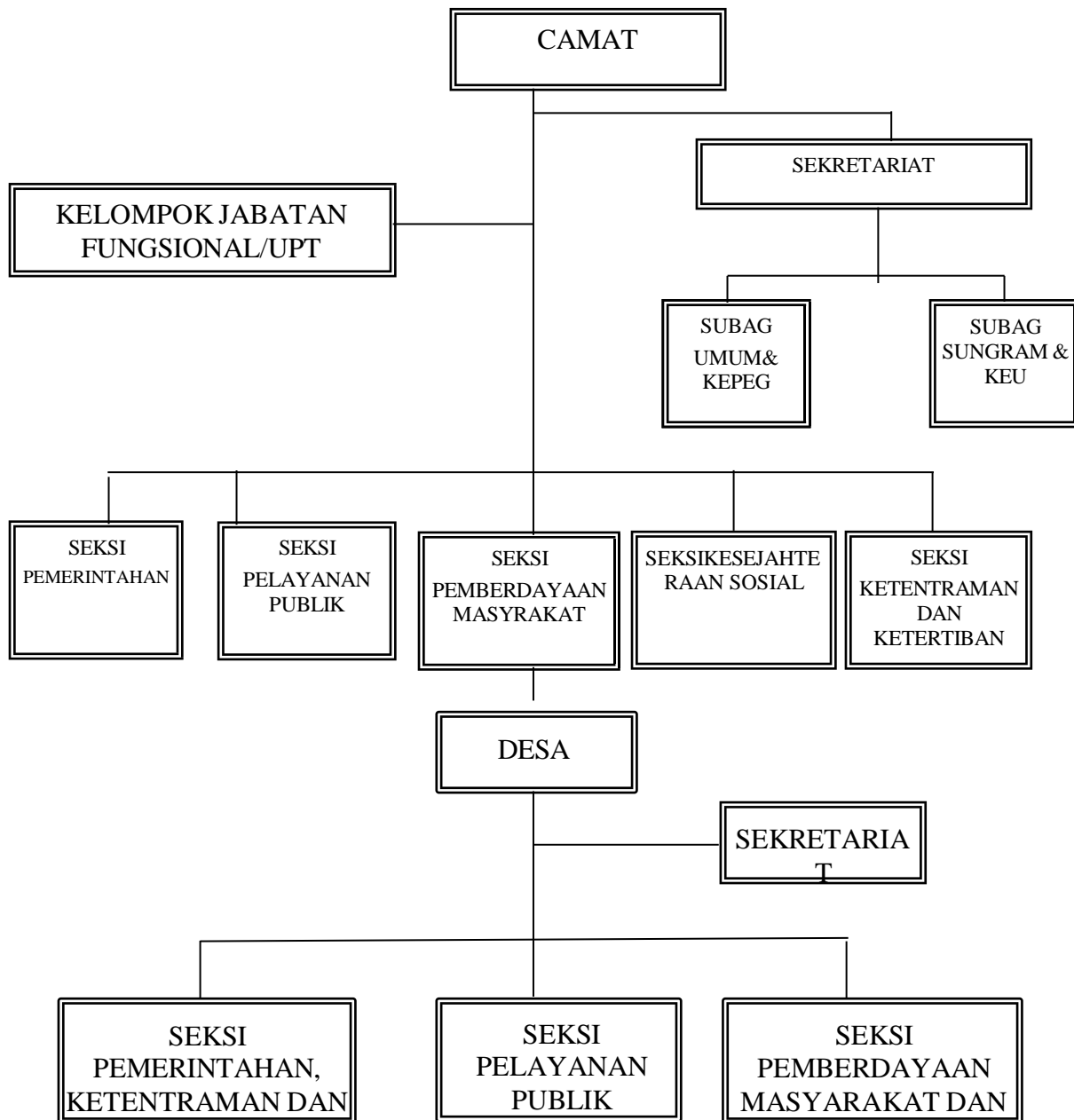
unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan publik;
- f. penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dipimpin oleh Camat Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
WONODADI :**



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Wonodadi
 Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar memiliki ASN sebanyak 10 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan di tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada tahun 2024

Tabel 1. 1 Data ASN Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Camat	1 Orang
2	Sekretaris Camat	1 Orang
3	Kepala Seksi	5 Orang
4	Kasubag	2 Orang
5	Staf	1 Orang
	Total	10 Orang

B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh Perangkat Daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Tabel 1. 2 Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan	Belum optimalnya pelayanan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan sesuai SOP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial Belum optimalnya pembinaan desa agar memiliki administrasi yang baik Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah
		Belum optimalnya koordinasi linmas	Minimnya sarana dan prasarana trantib untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan
		Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
		Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah
		Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana sosial, umum yang menjangkau seluruh wilayah
		Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya. Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.

- b. Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU ;
- c. Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- d. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- e. Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;

Tabel 1. 3 Isu-isu Strategis Kecamatan Wonodadi

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan Wonodadi perlu ditingkatkan Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan
2	Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ditetapkan di atasnya
3	Peningkatan koordinasi dan ketertiban umum	Minimnya sarana dan prasarana transtib untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan
4	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Minimnya SDM yang dimiliki oleh Desa sehingga ada kegiatan ekstra dalam bimbingan
5	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dalam menjalankan tupoksinya
		Belum optimalnya pembinaan desa agar memiliki administrasi yang baik

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar);
7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

D. Sistematika Dokumen

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Dasar Hukum

D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran

C. Indikator Kinerja Utama

D. Perjanjian Kinerja

E. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Capaian Kinerja Organisasi

1. Menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator kinerja;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
9. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Pemecahan Masalah

C. Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)”**.

Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021- 2026 Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2021-2026 diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

MISI 1 : “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.”

Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, religius sertaberbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi social diharapkan masyarakat dapat

saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya.

MISI 2 : “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.”

Misi ke-2 Kabupaten Blitar terfokus pada meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia tercapai melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan peningkatan pembangunan gender.

MISI 3 : “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.”

Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah terciptanya Reformasi Birokrasi yang berkualitas. Reformasi Birokrasi yang berkualitas adalah melalui peningkatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

MISI 4 : Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Misi ke-4 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di

Kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya kondusivitas daerah. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

Dalam hal ini kecamatan melaksanakan amanat Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya dan Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas”.

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Blitar maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Tujuan Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
 - a. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Sasaran : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa serta pemberdayaan masyarakat desa
2. Tujuan Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa
 - a. Sasaran : Meningkatnya kuliatas dan mendekatkan pelayanan
sampai ke desa
3. Tujuan Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, toleransi, Solidaritas Sosial, Dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat
 - a. Sasaran : Menurunnya jumlah pelanggaran di Kecamatan

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU pada Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran Renstra PD	Indikator Kinerja Utama PD	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial	Kasi Trantib Kasi Pelayanan Publik	<p>Indeks Kesalehan Sosial adalah Indikator Komposit dari Aspek Solidaritas Sosial, Aspek Toleransi, Aspek Kerjasama/Mutualitas, dan Aspek Stabilitas/Ketertiban Umum</p> $I_{Kerjasama} = \frac{(W_1 \times I_{Kontribusi}) + (W_2 \times I_{Totalitas Kerja})}{W_1 + W_2}$ $I_{solidaritas\ social} = \frac{(W_1 \times I_{sikap\ peduli}) + (W_2 \times I_{Sikap\ Memberi})}{W_1 + W_2}$ $I_{toleransi} = \frac{(W_1 \times I_{menghargai\ perbedaan}) + (W_2 \times I_{Menerima\ Multikultura})}{W_1 + W_2}$ $I_{ketertibanUmum} =$

2	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa	IKM Pelayanan Publik	Kasi Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi PerUnsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$ $\frac{1}{4} = 0,071$
		Persentase Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindak lanjuti	Kasi Pelayanan Publik	$\frac{\Sigma \text{Keluhan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{keluhan yang masuk}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Sekretaris Camat	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Oleh Inspektorat Kabupaten Blitar
		Predikat Sakip	Kasubag	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan

			Sungram	Wonodadi Kabupaten Blitar Oleh Inspektorat Kab.Blitar
		Persentase desa yang memiliki Administrasi yang baik	Kasi Pemerintahan dan Kasi PMD	$\frac{\Sigma \text{Desa Administrasi Baik}}{\Sigma \text{Desa}} \times 100\%$ <p>Indikator penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecepatan/ kepatuhan pemenuhan dokumen pencairan 2) Kelengkapan Dokumen Pencairan Anggaran dari kualitatif terhadap SPP Panjar dan SPP Definitif 3) Kebenaran/ Validitas Dokumen Pencairan Anggaran 4) Prosentase Penyerapan APBDes
		Jumlah Bumdes yang sehat	Kasi PMD	<p>Jumlah Bumdes di Wilayah Kecamatan Wonodadi</p> <p>(Kelengkapan administrasi yaitu kelengkapan AD/ ART, Berbadan Hukum)</p>

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2024 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik Jumlah Bumdes yang ada di Kecamatan	90 % 11 Desa
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perdikat Sakip	BB
4.	Menurunnya jumlah pelanggaran trantibum diwilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan	100 %

E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka disediakan anggaran sebesar Rp. 2.397.278.053 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran

tahun 2024 sebesar Rp. 2.343.600.009 dengan rincian sebagai mana tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Rincian Anggaran Pada Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.112.442	Rp 1.112.442
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.542.565.553	Rp 1.488.887.509
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 18.780.000	Rp 18.780.000
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 843.600	Rp 843.600
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Rp 98.440.000	Rp 90.160.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi	Rp 4.315.347	Rp 4.315.347

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 12.446.714	Rp 14.225.489
	<i>Sub Kegiatan</i> : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 56.283.302	Rp 56.283.868
	<i>Sub Kegiatan</i> : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 1.594.848	Rp 1.594.848
	<i>Sub Kegiatan</i> : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 47.151.040	Rp 19.193.040
	<i>Sub Kegiatan</i> : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 1.706.070	Rp 1.706.070
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 83.016.789	Rp 90.441.912
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 16.405.000	Rp 16.405.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 87.230.352	Rp 87.230.352
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	Pemerintahan Daerah		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 76.112.500	Rp 76.112.500
	<i>Sub Kegiatan</i> : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 11.080.000	Rp 8.930.000
	<i>Sub Kegiatan</i> : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 55.930.000	Rp 72.765.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 2.298.040	Rp 2.298.040
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Fasilitasi Percepatan Pencapaian	Rp 1.793.040	Rp 2.783.040

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 5.293.040	Rp 5.293.040
3	Program Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Des		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 4.968.864	Rp 4.968.864
	<i>Sub Kegiatan</i> : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 5.591.080	Rp 5.591.080
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui	Rp 1.918.040	Rp 1.543.040

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rp 1.918.040	Rp 1.543.040
	<i>Sub Kegiatan</i> : Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rp 2.293.040	Rp 1.543.040
	<i>Sub Kegiatan</i> : Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan <i>Sub Kegiatan</i> : Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rp 99.943.040	Rp 128.733.040
	<i>Sub Kegiatan</i> : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp 1.918.040	Rp 1.543.040
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	Kegiatan ; Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 4.091.080	Rp 4.091.080
	<i>Sub Kegiatan</i> : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 2.203.296	Rp 2.203.296
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 3.203.296	Rp 3.203.296
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp 82.682.160	Rp 89.837.160

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	<i>Sub Kegiatan</i> : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 15.796.080	Rp 15.766.776
	<i>Sub Kegiatan</i> : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 3.586.080	Rp 3.586.080
	<i>Sub Kegiatan</i> : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp5.586.080	Rp -
	<i>Sub Kegiatan</i> : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp7.293.040	Rp 1.500.000
	<i>Sub Kegiatan</i> : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan batas desa	Rp6.303.040	Rp -
	<i>Sub Kegiatan</i> : Fasilitasi	Rp 15.586.080	Rp 10.586.080

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
	Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Total Anggaran	Rp 2.397.278.053	Rp 2.343.600.009

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclousure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No	Sasaran	Rata - rata capaian kinerja	Predikat Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa	100 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan desa	90 %	Tinggi
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	62,8 / B	Rendah
4.	Menurunnya jumlah	100 %	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Rata - rata capaian kinerja	Predikat Kinerja
	pelanggaran trantibum diwilayah kecamatan		

B. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2024

1. Definisi Operasional dari Setiap Indikator Kinerja

a. Sasaran strategis “meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti” mencapai 100% sama dengan tahun 2023. Indikator kinerja ini dihitung dengan jumlah keluhan yang ditindaklanjuti dibagi dengan keluhan yang masuk dikali 100%.

b. Sasaran strategis “meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa” dengan indikator prosentase desa yang memiliki administrasi baik terdapat ada kenaikan dari tahun 2023. Pada tahun 2024 ini Kecamatan Wonodadi memberikan reward kepada Desa Kaliboto dan Desa Rejosari sebagai Desa dengan Kinerja Terbaik dengan nilai 8,8. Dengan skala penilaian 0 – 3 (kategori sangat

kurang), 3 – 5 (kategori kurang), 5 – 6 (kategori cukup), 6 – 7 (kategori baik), 7 – 8 (kategori sangat baik), 8 – 9 (kategori memuaskan), 9 – 10 (kategori sangat memuaskan). Penilaian ini berdasarkan:

1) Kecepatan/ Kepatuhan Pemenuhan Dokumen Pencairan, Laporan dan Permintaan Data Lainnya.

Obyek penilaiannya dari Siskeudes yaitu kecepatan pengajuan pencairan dilihat dari tanggal pengajuan SPP Desa per tribulan

2) Kelengkapan Dokumen Pencairan Anggaran

Obyek penilaiannya dari kuantitatif

3) Kebenaran/ Validitas Dokumen Pencairan Anggaran

Obyek penilaiannya dari hasil monev dan catatan pada lembar kendali pengawasan/ verifikasi berkas pengajuan pencairan

4) Prosentase Penyerapan APBDes

Obyek penilaiannya dari Siskeudes di label penyerapan anggaran

Untuk BUMDes indikator yang digunakan adalah kelengkapan administrasi yaitu kelengkapan AD/ ART, Berbadan Hukum

5) Kelengkapan administrasi Pemerintahan Desa

Obyek penilaiannya dari berkas administrasi aset, BPD dll.

Serta indikator kinerja jumlah BUMDes diukur dengan BUMDes di Desa se Kecamatan Wonodadi yang sudah memiliki AD/ART.

Tabel 3. 3 Hasil Evaluasi SAKIP 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	19,2
2	Pengukuran Kinerja	30	18,6

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
3	Pelaporan Kinerja	15	8,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75
	Jumlah	100	62,8

Sumber: Data yang sudah diolah

- c. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator predikat SAKIP perangkat daerah tidak terdapat perbedaan dengan tahun 2023, tapi untuk nilai SAKIP turun dari 69,74 menjadi 62,8 dan dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 100 %. Nilai ini masuk dalam kategori baik yaitu terdapat gambaran bahwa SAKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Dengan rincian seperti berikut:
- d. Sasaran strategis “menurunnya jumlah pelanggaran trantibum diwilayah Kecamatan” dengan indikator kinerja “persentase penurunan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan” mencapai 100%. Indikator kinerja ini dapat dihitung dengan perbandingan pelanggaran di tahun 2024 dengan tahun 2023 dikali 100%.

2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024 Kantor Kecamatan Wonodadi mempunyai 6 (Enam) program kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Hasil capaian kinerja masing - masing sasaran akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	90%	90,9%	100%
		Jumlah BUMDES	11 Desa	11 Desa	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	B	B
4.	Menurunnya Jumlah Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	100%	100%	100%
Capaian Kinerja					100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis 1 “Persentase indeks kepuasan masyarakat dan persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti” menargetkan pencapaian kinerja sebanyak 100% dan terealisasi 100%, dengan begitu capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja tahun 2024 sama dengan capaian kireja pada tahun 2023.

Sasaran strategis 2 yaitu “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa” sasaran menargetkan pencapaian kinerja **90%**. Dan pada tahun 2024 ini tercapai **90.9%**. Dari realisasi terget ini capaian kinerja mencapai 100%. Dan dari 11 (sebelas) BUMDes terdapat 11 (sebelas) BUMDes yang mempunyai administrasi lengkap. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh Desa Kaliboto dan Desa Rejosari yang memiliki kenaikan jumlah nilai rata-rata desa yang memiliki administrasi baik dan peningkatan nilai administrasi baik dari semua desa yang ada di Kecamatan Wonodadi serta bertambahnya BUMDes yang sudah memilik AD/ART lengkap.

Sasaran strategis 3 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” menargetkan pencapaian score SAKIP SKPD dengan nilai BB dan tahun 2024 berhasil tercapai dengan score 62,8. Angka ini terdapat pada interval nilai >60-70 dengan interpretasi SAKIP B sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wonodadi Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Dapat kita lihat pada tabel 3.3 penurunan kinerja ini disebabkan karena berbagai faktor yaitu pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Namun yang memiliki nilai terendah dengan bobot nilai yang tinggi adalah pada pengukuran kinerja yang dalam hal ini perlu mendapat perhatian adalah monitoring rencana aksi dilakukan secara insidental, pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) sedangkan berdasarkan informasi bahwa Aplikasi SIYAKIN tidak dapat digunakan, pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk

penyesuaian kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja. Pada tabel 3.3 indikator perencanaan kinerja juga berpengaruh besar dalam perolehan nilai hasil evaluasi dan yang perlu mendapat perhatian atas perencanaan kinerja yaitu belum keseluruhan dokumen perencanaan diformalkan, belum mengunggah dokumen perencanaan di situs resmi Kecamatan, Inkonsistensi antar dokumen perencanaan diantaranya adalah IKU dan Renstra, tujuan belum dicantumkan dalam dokumen SK IKU Perangkat Daerah tahun 2024, perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan yang akan dicapai disetiap level jabatan, belum terdapat bukti dukung atas analisis kegiatan dan anggaran dalam mencapai keberhasilan IKU (perubahan Renstra, IKU, Renja, DPA), belum keseluruhan PK pegawai di Kecamatan Wonodadi disajikan, belum terdapat notulen pembahasan perencanaan kinerja internal Kecamatan yang melibatkan seluruh pegawai.

Sedangkan sasaran strategis 4 yaitu “Menurunnya Jumlah Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan “pada tahun 2024 menargetkan persentase 100% dan berhasil tercapai dengan persentase 100%. Dari realisasi target ini capaian kinerja berhasil 100% sama dengan tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3. 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai ke Desa	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Baik	80%	72,72%	90,9%
		Jumlah Bumdes	10 Buah	10 Buah	11 Buah
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	62.33/B	69.74/B	62.8/B
4	Menurunnya Jumlah Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	100%	100%	100%

Melihat perbandingan dari tahun 2022, 2023, dan 2024 kita bisa melihat bahwa:

- a. Pada indikator kinerja Prosentase indeks kepuasan masyarakat dan persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti

tidak ada perubahan dari tahun 2022, 2023 dan 2024 yaitu sebesar 100%.

- b. Pada indikator kinerja persentase Desa yang memiliki administrasi baik terjadi penurunan pada tahun 2023 dari 80% menjadi 72,72% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 90,9%. Hal ini dikarenakan adanya pergantian instrumen penilaian dari Dinas PMD yang mana tahun 2022 lebih menitik beratkan pada tata pemerintahan Desa sedangkan pada tahun 2023 lebih menitik beratkan pada penyerapan anggaran kemudian dievaluasi pada tahun 2024 sehingga mengalami kenaikan realisasi. Untuk indikator BUMDes tidak ada perubahan kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 kemudian mengalami kenaikan menjadi 11 Desa yang memiliki BUMDes.
- c. Pada indikator kinerja Predikat SAKIP tidak ada perubahan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu kategori "B" akan tetapi ada kenaikan dalam hal nilai yaitu pada tahun 2022 tercapai dengan skor 62,33, sedangkan pada tahun 2023 tercapai dengan skor 69,74 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan skor menjadi 62,8.
- d. Pada indikator kinerja persentase penurunan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan tidak ada perubahan dari tahun 2022, 2023 dan 2024 yaitu sebesar 100%.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra pada Tahun 2021 – 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

4. Perbandingan Antara Realisasi dan Target Jangka Menengah

Perbandingan antara realisasi dan target jangka menengah Renstra digunakan untuk mengukur progres kinerja per tahun agar dapat dievaluasi tiap tahunnya untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perbandingan antara realisasi dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.6 pencapaian kinerja antara realisasi dan jangka menengah Renstra. Untuk mencapai target jangka menengah Renstra terdapat 2 indikator kinerja yang perlu dioptimalkan yaitu persentase desa yang memiliki administrasi baik yang sudah mencapai 90,9% dan predikat SAKIP perangkat daerah yang masih memiliki predikat B dengan skor 62,8

Tabel 3. 6 Pencapaian Kinerja Antara Realisasi dan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai ke Desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Baik	100%	90,9%	90,9%
		Jumlah Bumdes	11 Buah	11 Buah	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB/75	B/ 62.8	B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
	Daerah				
4	Menurunnya Jumlah Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	100%	100%	100%

5. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/ Kabupaten maka capaian ini belum bisa dibandingkan. Hal ini dikarenakan realisasi Provinsi / Nasional / Kabupaten pada tahun 2024 tidak memiliki sasaran strategis yang sama sehingga antara realisasi Kecamatan Wonodadi dan realisasi Provinsi dan Nasional masih belum bisa dibandingkan sedangkan realisasi tingkat kabupaten/Kecamatan dapat dibandingkan dengan sesuai sasaran. Berikut tabel 3.7 perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional/ Kabupaten/ Kecamatan yang hanya bisa kami isi bagian realisasi kinerja pada tahun 2024

Tabel 3. 7 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kecamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Prov/ Nas/ Kab/ Kec Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai ke Desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100 % (Kecamatan Pongkok)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi/ Nasional/ Kabupaten/ Kecamatan Tahun 2024
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Baik	90,9%	40 % (Kecamatan Ponggok)
		Jumlah Bumdes	11 Buah	4 (Kecamatan Ponggok)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	62.8 / B	52.6/CC (Kecamatan Ponggok)
4	Menurunnya Jumlah Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	Prosentase Penurunan Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	100 %	100 % (Kecamatan Ponggok)

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh semua Aparatur Kecamatan Wonodadi untuk melaksanakan semua indikator kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Kecamatan Wonodadi. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja selama tahun 2024.

Beberapa hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja diantaranya:

- a. Dilaksanakannya monitoring pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- b. Koordinasi rutin antara sekretaris Camat, Kasi dan Staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya;
- d. Dilakukannya koordinasi lintas instansi untuk sinergitas program/kegiatan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan pencapaian indikator sasaran, serta alternatif solusi pemecahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada
Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus) dipikirkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar. Mengingat Kecamatan adalah perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Kompleksnya berbagai pekerjaan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparatur yang ada. Sedangkan jumlah jabatan pelaksana (staf) yang ada di kecamatan masih belum memadai/ tidak mencukupi kebutuhan organisasi dan masih sangat jauh dari kebutuhan sesuai dengan Analisa jabatan yang ditetapkan.
- b. Masih kurang maksimalnya sarana dan prasarana kantor

Sudah diakui bahwa dibanding tahun-tahun sebelumnya, kondisi fisik bangunan Kecamatan

Wonodadi sudah cukup baik. Pada tahun 2024 sudah dibuat ruang pelayanan seperti selayaknya pelayanan PATEN tetapi masih belum optimal/ kurang adanya sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kantor kecamatan yang representative, aman, nyaman, ramah anak, ramah lansia dan peduli terhadap perempuan. Misalnya ruang tunggu yang nyaman, *playground*, ruang laktasi, loket antrian, kantor dan lingkungannya yang bersih dan nyaman.

Sarana prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan adalah kendaraan operasional. Kondisi yang ada kendaraan operasional di Kecamatan Wonodadi belum seimbang dengan jumlah Pejabat Struktural yang ada. Pemenuhan kebutuhan akan kendaraan operasional diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan di Kecamatan Wonodadi.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sasaran Strategis meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai Ke Desa

Realisasi kinerja tersebut didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai Ke Desa adalah sebesar Rp. 10.374.120 dengan realisasi sebesar Rp. 10.215.000. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa.

Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai ke Desa

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai ke Desa	100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 2.298.040	Rp 2.245.000	97,7%
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp 2.783.040	Rp 2.730.000	98,1%
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 5.293.040	Rp 5.240.000	99%
			Realisasi Anggaran	Rp. 10.374.120	Rp. 10.215.000	98,47%
			Tingkat efisiensi			1%

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai ke Desa ada 1 Program dan 3 Kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai ke Desa

didapat capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran tercapai 99% sehingga tingkat efisiensi tercapai 1%.

b. Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Desa.

Realisasi kinerja tersebut didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa adalah sebesar Rp. 184.904.080 dengan realisasi sebesar Rp. 181.260.540. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Desa

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberday	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Desa			
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Fasilitasi	Rp 8.000.000	Rp 7.920.000	99%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
	aan Desa		Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 15.766.776	Rp 15.625.000	99,1 %
			<i>Sub Kegiatan:</i> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 3.586.080	Rp 3.210.000	89,5 %
			<i>Sub Kegiatan:</i> Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp 0	Rp 0	100 %
			<i>Sub Kegiatan:</i> Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 1.500.000	Rp 600.000	40%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan batas desa	Rp 0	Rp 0	100 %
			<i>Sub Kegiatan:</i>	Rp 10.586.080	Rp 9.210.000	87%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 4.968.864	Rp 4.860.000	97,8 %
			<i>Sub Kegiatan:</i> Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	Rp 5.591.080	Rp 5.245.000	93,8 %

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kerja Kecamatan			
			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rp 1.543.040	Rp 1.490.000	96,5 6%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rp 1.543.040	Rp 1.490.000	96,5 6%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rp 1.543.040	Rp 1.465.000	94,9 %
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan <i>Sub Kegiatan:</i> Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rp 128.733.040	Rp 128.602.500	99,8 9%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Rp 1.543.040	Rp 1.490.000	96,5 6%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Alam			
			Realisasi Anggaran	Rp 184.904.080	Rp 181.207.500	98%
			Tingkat efisiensi			2%

Sasaran strategis meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa ada 2 program dan 2 kegiatan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dari sasaran strategis meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa didapat capaian kinerja sebesar 100% dan rata-rata capaian realisasi anggaran program tersebut adalah 98% sehingga tingkat efisiensi tercapai 2% yang dihitung dari prosentase capaian kinerja dikurangi dengan prosentase realisasi anggaran.

c. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi kinerja tersebut didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp.

2.048.986.977 dengan realisasi sebesar Rp. 1.927.351.671. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.112.442	Rp 780.000	70,1%
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Rp 4.315.347	Rp 4.173.000	96,7%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14.225.489	Rp 13.738.500	96,58%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 56.283.868	Rp 54.810.900	97,38%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 1.594.848	Rp 990.000	62,07%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 19.193.040	Rp 18.900.000	98,47%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 1.706.070	Rp 1.553.000	91,03%
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 90.441.912	Rp 87.407.000	96,64%
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 16.405.000	Rp 13.087.440	79,78%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RP. 87.230.352	Rp. 87.230.352	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Rp 76.112.500	Rp 54.886.842	72,1%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 8.930.000	Rp 8.810.000	98,66%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 72.765.000	Rp 69.370.534	95,34%
			Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.488.887.509	Rp 1.403.195.603	94,24%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 18.780.000	Rp 18.780.000	100%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 843.600	Rp 800.000	94,8%
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Peragkat Daerah			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 90.160.000	Rp 88.838.500	98,5%
			Realisasi Anggaran	Rp. 2.048.986.977	Rp. 1.927.351.671	94,06%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Tingkat efisiensi			B

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ada 1 program dan 7 kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatannya adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Realisasi anggaran tercapai 94,06% dengan capaian kinerja B.

d. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi kinerja tersebut didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebesar Rp. 99.334.832 dengan realisasi sebesar Rp. 97.500.000. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban.

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Menurunnya Jumlah Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 4.091.080	Rp 3.730.000	91,17%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 2.203.296	Rp 1.500.000	68,08%
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			<i>Sub Kegiatan:</i> Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 3.203.296	Rp 2.675.000	83,5%
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
			<i>Sub Kegiatan:</i> Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp 89.837.160	Rp 89.595.000	99,7%
			Realisasi Anggaran	Rp. 99.334.832	Rp. 97.500.000	98,15%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Tingkat efisiensi			1,85%

Sasaran strategis Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ada 2 Program dan 3 Kegiatan yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dari sasaran strategis meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum didapat capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran tercapai 98,15% sehingga tingkat efisiensi tercapai 1,85%.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program/Kegiatan dengan sasaran meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa, meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan desa, menurunnya jumlah pelanggaran trantibum diwilayah Kecamatan menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Sasaran meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa menunjukkan keberhasilan dalam

mencapai target kinerja dengan target 100% dan dapat direalisasikan 100%.

Sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan desa memberikan realisasi target yang melebihi target yang ditentukan hal ini disebabkan karena telah banyak Desa di Kecamatan Wonodadi yang telah memiliki administrasi yang baik, serta peningkatan jumlah BUMDesa yang telah sesuai dengan target yang telah ditentukan

Sasaran menurunnya jumlah pelanggaran trantibum diwilayah Kecamatan juga menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditargetkan 100% dan dapat direalisasikan 100%

Program/Kegiatan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah masih belum menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang mana target kinerja sasaran ini menargetkan predikat SAKIP dengan nilai BB sedangkan Kecamatan Wonodadi memperoleh nilai B.

C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 12 Realisasi kinerja dan keuangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%

1	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa.	Persentase keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Rp. 10.374.120	Rp. 10.215.000	98,47%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	90%	90,2%	100%	Rp 184.904.080	Rp 181.207.500	98%
		Jumlah Bumdes yang ada di Kecamatan	11 Desa					
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perdiklat Sakip	BB	B	B	Rp. 2.048.986.977	Rp. 1.927.351.671	94,06%
4	Menurunnya jumlah pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	Rp. 99.334.832	Rp. 97.500.000	98,15%

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk tahun 2024 yaitu 3 sasaran dengan kategori tinggi dan 1 sasaran yang masih belum memenuhi target kinerja.

- a. Sasaran meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa memiliki realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100% dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sasaran ini telah memenuhi target kinerja.
- b. Sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan desa memiliki 2 indikator kinerja yaitu persentase desa yang memiliki administrasi baik dengan realisasi sebesar 90,9% dengan target 90% dan jumlah Bumdes yang ada di Kecamatan Wonodadi dengan realisasi sebesar 11 Desa dengan target 11 Desa. Dan capaian kinerja kedua indikator tersebut sebesar 100%.
- c. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah memiliki realisasi kinerja predikat SAKIP B dengan target kinerja yang ditetapkan predikat SAKIP BB, sasaran ini masih belum memenuhi target yang telah ditentukan.
- d. Sasaran menurunnya jumlah pelanggaran trantibum diwilayah Kecamatan memiliki realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100% dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sasaran ini telah memenuhi target kinerja.

Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada

Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus) dipikirkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar. Mengingat Kecamatan adalah perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Kompleksnya berbagai pekerjaan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparatur yang ada. Sedangkan jumlah jabatan pelaksana (staf) yang ada di kecamatan masih belum memadai/ tidak mencukupi kebutuhan organisasi dan masih sangat jauh dari kebutuhan sesuai dengan Analisa jabatan yang ditetapkan.

2. Masih kurang maksimalnya sarana dan prasarana kantor

Sudah diakui bahwa dibanding tahun-tahun sebelumnya, kondisi fisik bangunan Kecamatan Wonodadi sudah cukup baik. Pada tahun 2024 sudah dibuat ruang pelayanan seperti selayaknya pelayanan PATEN tetapi masih belum optimal/ kurang adanya sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kantor kecamatan yang representative, aman, nyaman, ramah anak, ramah lansia dan peduli terhadap perempuan. Misalnya ruang tunggu yang nyaman, *playground*, ruang laktasi, loket antrian, kantor dan lingkungannya yang bersih dan nyaman.

2. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

- a. Dilaksanakannya monitoring pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

- b. Koordinasi rutin antara sekretaris Camat, Kasi dan Staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan.

Hal ini dilakukan agar terjalinnya keselarasan dalam pelaksanaan pekerjaan dilingkungan Kecamatan Wonodadi.

- c. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya.

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dilakukan agar kita dapat memperbaiki pekerjaan yang masih kurang dalam hal ini seperti mencukupi kekurangan penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat.

- d. Dilakukannya koordinasi lintas instansi untuk sinergitas program/kegiatan.

Melakukan koordinasi lintas sector terkait kebutuhan SDM yang ada di Kecamatan Wonodadi serta koordinasi terkait anggaran di kecamatan wonodadi untuk mendukung sarana dan prasarana kantor yang memadai.

C. Tindak Lanjut

Langkah-langkah sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Wonodadi pada tahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan optimalisasi kinerja dan manajemen kepegawaian.

2. Perlu dilakukan perencanaan anggaran dalam menunjang sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Wonodadi.

Perencanaan anggaran guna menunjang sarana prasarana Kantor Kecamatan Wonodadi sangatlah penting agar dalam waktu kedepan Kantor Kecamatan Wonodadi dapat mempunyai sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor yang baik.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	90 %
		Jumlah Bumdes yang ada di Kecamatan	11 Desa
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perdikat Sakip	BB
4.	Menurunnya jumlah pelanggaran trantibum diwilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan	100 %

C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran Renstra PD	Indikator Kinerja Utama PD	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan	Indeks Kesalahan Sosial	Kasi Trantib Kasi Pelayanan Publik	<p>Indeks Kesalahan Sosial adalah Indikator Komposit dari Aspek Solidaritas Sosial, Aspek Toleransi, Aspek Kerjasama/Mutualitas, dan Aspek Stabilitas/Ketertiban Umum</p> $I_{\text{Kerjasama}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{Kontribusi}}) + (W_2 \times I_{\text{Totalitas Kerja}})}{W_1 + W_2}$ $I_{\text{Solidaritas sosial}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{sikap peduli}}) + (W_2 \times I_{\text{sikap Memberi}})}{W_1 + W_2}$ $I_{\text{toleransi}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{menghargai perbedaan}}) + (W_2 \times I_{\text{Menerima Multikultural}})}{W_1 + W_2}$ $I_{\text{ketertibanUmum}} = \frac{(W_1 \times I_1) + (W_2 \times I_2) + (W_3 \times I_3) + (W_4 \times I_4) + (W_5 \times I_5)}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5}$ <p>Kemudian Indeks Kesalahan Sosial dihitung dengan Formula:</p> $I_{\text{kesalahan sosial}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{kerjasama}}) + (W_2 \times I_{\text{solidaritas sosial}}) + (W_3 \times I_{\text{toleransi}}) + (W_4 \times I_{\text{ketertiban Umum}})}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4}$
		Persentase Penurunan Pelanggaran di Kecamatan	Kasi Trantib	$\frac{\Sigma \text{Pelanggaran Tahun Berjalan}}{\Sigma \text{Pelanggaran Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Indikator penilaian adalah aduan Masyarakat yang ditindak lanjuti: Pencemaran Lingkungan, bencana alam, Pungli, Penertiban Banner yang</p>

					tidak sesuai prosedur, izin keramaian, pembinaan kemasyarakatan.
2	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa	IKM Pelayanan Publik	Kasi Kesos Kasi Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi PerUnsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{4} = 0,071$	
		Persentase Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindak lanjuti	Kasi Pelayanan Publik	$\frac{\Sigma \text{Keluhan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{keluhan yang masuk}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Sekretaris Camat	<p>Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Oleh Inspektorat Kabupaten Blitar</p> <p>Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Oleh Inspektorat Kab. Blitar</p>	
		Predikat Sakip	Kasubag Sungram		

D. Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Renstra PD	Indikator Kinerja Utama PD	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial	Kasi Trantib Kasi Pelayanan Publik	<p>Indeks Kesalehan Sosial adalah Indikator Komposit dari Aspek Solidaritas Sosial, Aspek Toleransi, Aspek Kerjasama/Mutualitas, dan Aspek Stabilitas/Ketertiban Umum</p> $I_{\text{Kerjasama}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{Kontribusi}}) + (W_2 \times I_{\text{Totalitas Kerja}})}{W_1 + W_2}$ $I_{\text{Solidaritas sosial}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{Sikap peduli}}) + (W_2 \times I_{\text{Sikap Membert}})}{W_1 + W_2}$ $I_{\text{toleransi}} = \frac{(W_1 \times I_{\text{menghargai perbedaan}}) + (W_2 \times I_{\text{Memerima Multikultural}})}{W_1 + W_2}$ $I_{\text{ketertibanUmum}} = \frac{(W_1 \times I_1) + (W_2 \times I_2) + (W_3 \times I_3) + (W_4 \times I_4) + (W_5 \times I_5)}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5}$ <p>Keterangan: I_1 = Keterlibatan Dalam Demokrasi; I_2 = Tata Pemerintahan yang baik; I_3 = PencegahanKekerasan; I_4 = KonservasiLingkunganSosial; I_5 = RestorasiLingkunganSosial. Kemudian Indeks Kesalehan Sosial dihitung dengan Formula:</p> $I_{\text{kesalehan sosial}} =$

					$\frac{(W_1 \times I_{\text{kebijaksanaan}}) + (W_2 \times I_{\text{solidaritas sosial}}) + (W_3 \times I_{\text{toleransi}}) + (W_4 \times I_{\text{ketertiban umum}})}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4}$
					$\frac{\Sigma \text{Pelanggaran Tahun Berjalan}}{\Sigma \text{Pelanggaran Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Indikator penilaian adalah aduan Masyarakat yang ditindak lanjuti: Pencemaran Lingkungan, bencana alam, Pungli, Penertiban Banner yang tidak sesuai prosedur, izin keramaian, pembinaan kemasyarakatan.</p>
					$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total Unsor yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsor}} = \frac{1}{4} = 0,071$
					$\frac{\Sigma \text{Keluhan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{keluhan yang masuk}} \times 100\%$
					<p>Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Oleh Inspektorat Kabupaten Blitar</p>
					<p>Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Oleh Inspektorat</p>

			Kab. Blitar	
		<p>Persentase desa yang memiliki Administrasi yang baik</p>	<p>Kasi Pemerintahan dan Kasi PMD</p>	<p>$\frac{\sum \text{Desa Administrasi Baik}}{\sum \text{Desa}} \times 100\%$</p> <p>Indikator penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Kecepatan/ kepatuhan pemenuhan dokumen pencairan 3) Kelengkapan Dokumen Pencairan Anggaran dari kualitatif terhadap SPP Panjar dan SPP Definitif 4) Kebenaran/ Validitas Dokumen Pencairan Anggaran 5) Prosentase Penyerapan APBDes
	<p>Jumlah Bumdes yang sehat</p>	<p>Kasi PMD</p>	<p>Jumlah Bumdes di Wilayah Kecamatan Wonodadi</p> <p>(Kelengkapan administrasi yaitu kelengkapan AD/ ART, Berbadan Hukum)</p>	